

PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sarifah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu berperan sebagai dinamisator, berperan sebagai katalisator, berperan sebagai pelopor, dan faktor penghambat. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informan yaitu Kepala Desa atau Sekretaris Desa, informan penelitian yaitu Staf-staf Desa, Ketua BPD, Ketuan LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat Di Desa Telaga. Data sekunder diperoleh dari observasi, wawancara, perpustakaan dan penelitian di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini yang diperoleh secara umum adalah peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan cukup baik. Namun, masih terdapat masalah yang belum bisa teratasi dengan maksimal, seperti Kepala Desa Telaga yang terlalu sering berpergian keluar kota untuk melakukan urusannya. Sehingga, jarang sekali berda di Desa selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya peranan dari seorang pemimpin di Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan. Pembangunan yang ada pun masih terbengkalai dan tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Masyarakat juga tidak dilibatkan semua dalam kegiatan rapat atau musrenbang.

Kata Kunci : *Peranan Pemerintah Desa sebagai Dinamisator, Katalisator dan Pelopor, Faktor Penghambat.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Pendahuluan

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perhatian pembangunan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa disebutkan bahwa selaku Kepala Desa membuat peraturan desa terkait anggaran pendapatan belanja daerah desa yang digunakan untuk proses pelaksanaan pembangunan, Sebagaimana yang terdapat pada Perdes Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, ditetapkan dengan peraturan desa.

Dilihat dari kondisi riil sementara tentang aparat Desa Telaga, menurut pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Seperti halnya, pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musrenbang mengenai perencanaan pelatihan kelompok tani yang akan diadakan dibalai desa. Namun, informasi yang diberikan kepada ketua RT masing-masing masih sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga, masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam proses pembangunan. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut kepentingan

masyarakat terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Maka disini terlihat bahwa, lemahnya peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Menunjukkan bahwa kurangnya peranan pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas maka peneliti ini mempunyai kegunaan, yaitu adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Segi Teoritis

Menjadikan bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa Telaga dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, maka setiap penelitian diharapkan akan bermanfaat dan berguna untuk berbagai pihak.

b. Segi Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur untuk mendapatkan pengetahuan yang baru bagi masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Organisasi Pemerintahan

Organisasi dibentuk karena manusia sadar bahwa berbagai kebutuhan yang ingin dimiliki tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh manusia itu sendiri. Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 2001:56).

Peranan Organisasi Pemerintah Desa

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling tergantung dengan yang lain, demikian pula sebaliknya (Soekanto, 2013:213). Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai Institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, (Nurcholis,2011:75).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada ayat (1) tentang Desa, kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;

Kepemimpinan Kepala Desa

Konsep “pemimpin” berasal dari kata asing “*leader*” dan “kepemimpinan” dari “*leadership*”. Pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok, mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dan posisi dalam mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuannya, Raven (dalam Wirjana, 2006:4). Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan (Kartono, 2005:153).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai Desa dengan menegaskan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 127 sekarang berubah menjadi peraturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Kepala Desa, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27).

Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan sosial dan susunan pola masyarakat dalam sarana pembagian masyarakat akan berubah, perataan hasil pembangunan dimantapkan, teknologi akan menyusul perubahan dengan pertumbuhan ekonomi lebih pesat akibat produsen utama yang memiliki tenaga kerja mendapat kejutan dan rangsangan baru menurut Tjondronegoro (dalam Afiffuddin,2010:119).

Definisi Konsepsional

Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu terkait aspek kedudukan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus masyarakat dengan memberikan dorongan mental untuk menggerakkan dalam rangka melakukan perubahan yang berencana untuk mencapai tujuan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat secara langsung agar bisa turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Pemerintah desa yang berperan sebagai dinamisator, katalisator maupun pelopor harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat setempat dengan memberikan peluang dan kesempatan terhadap masyarakat untuk ikut sertakan ke dalam perencanaan pembangunan di desa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif,yaitu menggambarkan atau melukis keadaan subjek dan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tidak mencari hubungan permasalahan. Penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2009:193).

Fokus Penelitian

Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Selaku kepala desa atau pemimpin dalam penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang terjadi, mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan.

1. Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :
 - a. Berperan sebagai Dinamisator
 - b. Berperan sebagai Katalisator
 - c. Berperan sebagai Pelopor
2. Faktor-faktor penghambat peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Sumber dan Jenis Data

Penunjukkan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana metode ini digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup, dan kredibilitas yang baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.

Atas dasar pertimbangan untuk menggunakan teknik *purposive sampling* ini maka yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kemudian yang menjadi informannya yaitu Kepala Dusun, ketua RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, dan Masyarakat.

Adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini, meliputi :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain :
 - a. Dokumen-dokumen, yaitu laporan evaluasi untuk mempelajari laporan serta arsip yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Buku-buku ilmiah, yaitu hasil penelitian yang relevan dengan indikator penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian, penulis menggunakan beberapa langkah, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari bahan literatur yang terkait dengan judul penelitian ini
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik, yaitu observasi, informan (wawancara), dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, berupa jenis data berbentuk tulisan yang sifatnya bukan angka, sumber Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-32), yang mengatakan bahwa analisis data deskriptif kualitatif terdiri dari beberapa langkah-langkah dalam penelitian.

Dibawah ini penjelasan tentang penyajian analisis kualitatif agar bisa memahami secara lebih jelas kerangka alur yang disajikan di atas, yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*), merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian catatan-catatan dari lapangan secara tertulis.
3. Penyajian Data (*Display Data*), terkait alur penting kedua dan aktivitas yaitu penyajian data. Penyajian merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*), alur ketiga dari aktivitas analisis yaitu pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif, menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan alur kausal dan proposisi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Telaga

Visi dan Misi bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Telaga dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Telaga sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Telaga Yang Rukun dan Makmur serta Terdepan Dalam Segala Bidang”. Untuk meraih Visi Desa Telaga seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Telaga sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Telaga yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Telaga adalah terdiri dari 179 KK. Terhitung dengan jumlah total 647 jiwa, dengan rincian 338 laki-laki dan 309 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Desa Telaga mayoritas laki-laki yang lebih dominan dari perempuan. Hal ini, bisa dilihat penduduk Desa Telaga kebanyakan di huni oleh laki-laki daripada perempuan.

Secara geografis Desa Telaga terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Secara administratif, Desa Telaga terletak di wilayah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dengan posisi dibatasi oleh wilayah Desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Makmur Kecamatan Long Mesangat. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Rawa Indah Kecamatan Batu Ampar. Jarak tempuh Desa Telaga ke ibu kota kecamatan adalah 1,8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 165 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 8,07 jam.

Hasil Penelitian

Peranan Pemerintah Desa sebagai Dinamisator untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peranan Pemerintah Desa selaku Aparatur Desa dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung sistem pemerintahan dengan mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Meningkatkan peran serta dari masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan gotong royong. Maka, akan mempercepat proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Peranan dari Pemerintah Desa untuk mengajak masyarakat melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan pembangunan. Kepala desa selaku pemimpin di Desa juga harus bisa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Kepala Desa harus memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat Desa agar mau berperan aktif selama

kegiatan pembangunan berlangsung. Kepala Desa selaku aparat Pemerintah Desa, juga sudah berusaha untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti arahan dari Kepala Desa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Peranan Pemerintah Desa sebagai Katalisator untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peranan Pemerintah Desa sebagai katalisator yaitu seorang pemimpin yang mengkoordinir dan mengawasi secara langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan di Desa. Dengan adanya peran dari Kepala Desa selaku aparatur Pemerintah Desa, maka harus mampu mengawasi bagaimana kegiatan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian menghimbau masyarakat agar mau berpartisipasi selama proses pembangunan yang berlangsung. Kepala Desa selaku pemimpin juga menjalankan perannya dengan mendorong semangat masyarakat terhadap laju perkembangan pembangunan di Desa. Dengan melakukan berbagai upaya-upaya dari Pemerintah Desa untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pembangunan di Desa. Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat setempat dalam kegiatan pembangunan. Kepala Desa selaku aparatur pemerintahan Desa mendukung adanya pembentukan Kabupaten yang baru.

Peranan Pemerintah Desa sebagai Pelopor untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peranan Pemerintah Desa sebagai pelopor dengan menunjukkan kewibawaan yang tinggi terhadap masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah Desa harus bisa untuk mengayomi masyarakat dengan memberikan contoh teladan yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi serta dapat memberikan penampilan yang terbaik pula kepada masyarakat. Maka masyarakat pun akan senantiasa menghargai dan menghormati seorang pemimpin tersebut. Mengingat pentingnya pembangunan di Desa, pemerintah juga harus bisa membimbing masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa. Pemerintah Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah mengupayakan memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat di Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin di desa telah menunjukkan kewibawaan yang tinggi kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur

Dalam hal ini, yang menjadi faktor-faktor penghambat peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor tingkat kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor letak geografis (Dalyono, 2008:56). Faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga negara, karena pendidikan mampu

merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik (Firdaus, 2005:34). Dalam hal ini, tidak lepas dari hambatan-hambatan peranan Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terkait peranan pemerintah desa sebagai dinamisor bahwa Kepemimpinan Kepala Desa selama ini masih belum mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan. Kepala desa selama ini jarang ada di tempat . Sehingga, untuk menggerakkan masyarakatnya tanpa ada seorang pemimpin maka pemerintahan desa tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat desa perlu dorongan dari pemimpinnya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, kalau pemimpinnya sendiri sangat jarang di tempat. Maka, seperti apakah jadinya desa bisa berkembang, sementara pemimpinnya tidak bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Masyarakat pun belum sepenuhnya dilibatkan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. Maka akan terlihat, kurangnya partisipasi dari masyarakat, disebabkan belum adanya pelimpahan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Desa untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Telaga seperti pembangunan Kantor Rumah Adat yang belum ada mengikutsertakan pihak dari masyarakat untuk membantu kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Peranan pemerintah desa sebagai katalisator untuk Urusan Pemerintahan Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tidak bisa terkendali dan tidak dipertanggungjawabkan dengan tugas yang telah ditentukan. Kepala desa belum mampu mengkoordinir masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kemudian, Ketua BPD juga jarang ada ditempat. Sehingga, dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa selama ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Sebab, yang bertugas mengawasi tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya yang diberikan. Jadi, disini juga terlihat bagaimana sistem pemerintahan di desa Telaga selama ini sangat kurang maksimal. Kepala desa yang terlalu sering keluar kota dengan urusannya sendiri. Sehingga, masyarakatnya tidak ada yang mengkoordinir untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara, pemimpinnya tidak ada ditempat, Bagaimana desa bisa berkembang dengan baik kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan contoh teladan yang baik terhadap masyarakat di desa. Kepala Desa belum bisa menunjukkan peranannya kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa seperti pembangunan Balai Desa. Belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa. Kalau saja masyarakat juga di ikut sertakan maka, proses kegiatan pembangunan akan cepat dan mudah bisa terselesaikan dengan baik.

Peranan pemerintah desa sebagai pelopor untuk pemerintah desa belum sepenuhnya menangani masalah pembangunan yang ada di desa. Pembangunan masih banyak yang belum merata dan ada sebagian pembangunan belum bisa terselesaikan dengan baik. Peraturan yang dibuat memang sudah di taati dengan baik. Namun, pada saat mengadakan musrenbang banyak usulan-usulan dari masyarakat tidak di penuhi oleh pemerintah desa. Hal itu membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah desa. Sementara, pembangunan sebelumnya juga tidak bisa di selesaikan dengan jangka waktu yang telah di tetapkan. Dalam hal pembangunan seperti pembangunan Kantor BPD dan Kantor LPM yang berada di atas gunung di Desa Telaga. Masyarakat tidak sepenuhnya ikut dilibatkan dalam pembangunan Kantor tersebut. masyarakat tidak berani ikut campur kalau pemerintah Desa tidak memberikan wewenang kepada pihak masyarakat untuk turut berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan di Desa. Kepala Desa Telaga yang jarang berada di Desa, seharusnya memberikan wewenangnya kepada Sekretaris Desa untuk mewakili dalam memberikan perintah untuk masyarakat agar mau ikut serta di dalam kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Namun, Kepala Desa tidak pernah dan bisa dikatakan hanya ada beberapa kali berada di Desa. Melihat dalam hal itu, bagaimana seorang pemimpin bisa menunjukkan perannya kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Sementara, Kepala Desa juga kurang memberikan perannya yang baik terhadap masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa.

Kemudian fokus yang kedua adalah faktor penghambat disebabkan oleh keadaan wilayah di Desa yang terdiri dari sungai dan hutan. Sehingga, masyarakat yang tinggal di wilayah daerah tersebut berpencar-pencar tempat bermukimnya. Kondisi lain, seperti transportasi darat juga belum bisa digunakan dengan maksimal. Hal itu disebabkan keadaan jalan yang rusak dan tidak memungkinkan untuk di lewati oleh masyarakat setempat. Hambatan-hambatan yang terjadi juga disebabkan karena belum adanya pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Desa untuk melakukan tugas pokok dari Kepala Desa. Sebab, Kepala Desa yang terlalu sering berada di luar daerah dan sangat jarang berada di Desa Telaga. Sehingga, masyarakat merasa tidak adanya tanggungjawab yang diberikan oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Dalam hal kegiatan pembangunan juga, belum terlihat adanya pelaksanaan pembangunan yang dijalankan sesuai dengan pketentuan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :

1. Mengacu pada peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu :
 - a. Peranan pemerintah desa sebagai dinamisator di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung sistem pemerintahan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam hal ini belum berjalan dengan sepenuhnya sesuai keinginan. Masih kurangnya peranan dari Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Telaga. Masyarakat selama ini hanya sekedar diberikan arahan dari pemerintah desa tetapi tidak dalam pelaksanaannya. Sementara, kepala desa sendiri pun jarang ada di tempat. Seharusnya kepala desa sebagai pemimpin desa bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan kegiatan gotong-royong dalam proses pembangunan. Saat ini perkembangan pada Desa Telaga masih belum maksimal, disebabkan kepala desa yang kurang memperhatikan keadaan yang ada di Desa Telaga. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepala desa selaku aparatur pemerintah desa belum bisa menggerakkan masyarakatnya dengan sepenuhnya. Karena, selama ini pemimpinya sangat sibuk dengan urusan-urusannya diluar kota tanpa harus memikul tanggungjawabnya sebagai kepala desa Telaga.
 - b. Peranan pemerintah desa sebagai katalisator di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur juga menunjukkan bahwa kepala desa Telaga, belum memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Salah satu peranan dari kepala desa yaitu mengkoordinir masyarakat untuk bisa ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di desa Telaga. Namun, tidak terlaksana dengan baik, disebabkan pemimpinya sendiri sangat jarang berada di desa Telaga. Seperti halnya, dalam pembuatan KTP dan KK juga membuat masyarakat kecewa. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat kurang memuaskan. Masyarakat tersebut harus menunggu proses pembuatan KTP dan KK selama 1 bulan. Kemudian, setelah di datangi ke Kantor Desa ternyata pembuatannya belum selesai disebabkan keteledoran dari pemerintah desa. Kepala desa juga tidak bermukim di desa melainkan bermukim di desa lain. Seharusnya, kepala desa tersebut bertempat tinggal di desa sendiri. Tempat dimana beliau menjadi pemimpin di desa tersebut.
 - c. Peranan pemerintah desa sebagai pelopor di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat dengan menjalankan aturan

sesuai aturan yang berlaku. Menetapkan anggaran yang akan dilakukan sesuai dengan pertimbangan dan kesesuaian bangunan yang akan dibangun. Namun, menurut pendapat dari masyarakat setempat bahwa pembangunan tersebut belum berjalan dengan baik. Pembangunan yang tidak di selesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk masalah terkait adanya perselisihan antar masyarakat setempat selama ini sudah di atasi dengan baik. Pemerintah desa mengadakan musyawarah untuk mencari solusi yang tepat, agar tidak menimbulkan konflik yang berlarut lama.

2. Faktor-faktor penghambat yang terjadi di Desa Telaga sudah bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah desa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah faktor penghambat sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, kendala yang terjadi disebabkan karena kepala desa yang tidak berada di Desa. Kepala desa jarang berada di Desa karena terlalu sering berada diluar kota melakukan urusannya. Sehingga, selama ini yang menangani masalah tersebut hanya di lakukan oleh Sekretaris Desa dan staf-staf desa lainnya. Faktor penghambat lainnya juga disebabkan karena terbatasnya informasi yang diperoleh. Sehingga, berita-berita yang penting sangat sulit untuk bisa didapatkan. Transportasi darat yang belum tersedia di Desa Telaga. Apabila, ada keadaan darurat yang terjadi pasti akan sangat sulit diatasi dengan cepat dan mudah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas dalam Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Terkait masalah anggaran juga sebaiknya bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Telaga.
2. Kepala desa selaku aparatur pemerintah desa seharusnya bermukim di Desa Telaga tempat beliau memimpin. Sehingga, kepala desa bisa menjalankan tanggungjawabnya untuk bisa menggerakkan masyarakat agar turut aktif dalam menjalankan kegiatan pembangunan di desa.
3. Diharapkan Kepala Desa Telaga agar lebih berpartisipasi terhadap masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan mendukung pelaksanaan pembangunan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat.
4. Kepala Desa dan juga aparatur Pemerintah Desa diharapkan melakukan pengawasan yang terkait kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik. Sehingga, kalau terjadi permasalahan selama proses kegiatan pembangunan berlangsung, Pemerintah Desa siap aktif untuk menanganinya.

5. Pemerintah Desa diharapkan untuk mengkoordinir masyarakat dan mengajak bersama-sama untuk mengevaluasi hasil kegiatan pembangunan di Desa. Sehingga, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Penerbit: ALFABETA. Bandung.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Kartono, Kartini. 2005. *Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Keating, Charles J. 2006. *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*. Kanisius. Yogyakarta.
- Miles, Mathew B, A. Michael Hubberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Makmur, Syarif. 2003. *Gagasan Pemberdayaan Dan Partisipasi Sebuah Aplikasi Untuk Masyarakat Lokal*. Wahyu Press. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Metodologi Pembangunan Desa*. PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Nurseno. 2007. *Sosiologi II*. PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo.
- Robbins, P. Stephen. 2001. *Perilaku Organisasi*. Pearson Education Asia. PT. Prehalindo. Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru. Rajawali Pers. Jakarta
- 2005. *Pembangunan dan Segala Aspeknya*. CV. Rajawali Pers. Jakarta.
- 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Rajawali Pers. Jakarta..
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wirjana, Bernadine R. & Susilo. Supardo. 2006. *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Andi. Yogyakarta.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Desa Nomor 1 tentang APB-Desa
- Peraturan Desa Nomor 2 tentang Review RPJM-Desa